

# **PROBLEMATIKA PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG PADA PT ASURANSI JIWasRAYA**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2931K/Pidsus/2021)**

**YULLY LESTARI TASDIKIN**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan* untuk menganalisis penerapan kewenangan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam penyelesaian barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya serta menganalisis tentang problematika penyelesaian barang rampasan negara yang dinyatakan dirampas untuk negara. *Teori yang digunakan*, adalah teori negara hukum, teori penegakan hukum dan teori kewenangan. *Metode penelitian*, yang digunakan, adalah metode penelitian yuridis normatif. *Hasil penelitian*, sisi penegakan hukum, pengurusan barang rampasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutorial dalam rangka menjalankan putusan pengadilan. Kewenangan eksekutorial ini melekat secara fungsional pada jaksa sebagai penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Terkait barang rampasan, kewenangan eksekutorial jaksa secara spesifik diatur dalam pasal 273 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Beleid* tersebut memberi kewenangan jaksa, dalam jangka waktu tertentu, untuk menguasai penjualan atas barang rampasan kepada kantor lelang dan menyetorkan hasil penjualannya ke kas negara. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kewenangan Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang diterapkan dalam penyelesaian barang rampasan negara pada perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya serta adanya problematika dari penyelesaian barang rampasan negara berupa kapal yang dinyatakan dirampas untuk negara yaitu terdapat gugatan perdata yang menyatakan Kejaksaan Agung dan Pusat Pemulihan Aset telah melakukan perbuatan melawan hukum.

**Kata kunci:** barang rampasan, negara.

**PROBLEMS OF THE SETTLEMENT OF STATE LOOTED GOODS IN THE  
CRIMINAL ACT OF CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING AT  
PT ASURANSI JIWASRAYA**

*(Case Study: Supreme Court Decision Number 2931K/Pidsus/2021)*

**YULLY LESTARI TASDIKIN**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the application of the authority of the Asset Recovery Center (PPA) in the settlement of state confiscation in the corruption and money laundering cases of PT Asuransi Jiwasraya and to analyze the problems of the settlement of state booty which was declared confiscated for the state. The theory used is the rule of law theory, law enforcement theory and authority theory. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study, from the side of law enforcement, management of booty are part of the implementation of the executorial function in order to carry out court decisions. This executive authority is functionally attached to the prosecutor as a public prosecutor who is authorized by law to carry out prosecutions and carry out judges' decisions. Regarding booty, the prosecutor's executorial authority is specifically regulated in Article 273 paragraphs 3 and 4 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). The regulation authorizes the prosecutor, within a certain period of time, to authorize the sale of confiscated goods to the auction office and deposit the proceeds of the sale into the state treasury. The results of this study are the authority of the Asset Recovery Center (PPA) which is applied in the settlement of state confiscated goods in the corruption and money laundering cases of PT Asuransi Jiwasraya as well as the problems of the settlement of state confiscated goods in the form of ships that are declared confiscated for the state, namely there is a civil lawsuit. which stated that the Attorney General's Office and the Asset Recovery Center had committed unlawful acts.*

**Keywords: booty, state.**